

Analisis Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (Kube) Fakir Miskin Kabupaten Sumedang

Epi Supiadi

*Politeknik Kesejahteraan Sosial,
Jalan Ir. H. Djuanda No. 367, Dago, Bandung 40135,
epi_supiadi@poltekesos.ac.id or episupiadi4@gmail.com*

Marjuki

*Politeknik Kesejahteraan Sosial,
Jalan Ir. H. Djuanda No. 367, Dago, Bandung 40135*

Rosilawati

*Politeknik Kesejahteraan Sosial,
Jalan Ir. H. Djuanda No. 367, Dago, Bandung 40135*

Abstract

The institutional aspect of Joint Business Groups (KUBE) is very important in empowering the poor. This article discusses some of the research results of the KUBE for the Poor in Sumedang Regency, which used descriptive statistical methods with quantitative and qualitative approaches, with a purposive sampling technique producing a main sample of 52 respondents and a supporting sample of 33 informants from KUBE members, facilitators, assistants and officials. organizer of the KUBE FM Program. The research results show that the institutional aspect is in the medium to high category, where there are 25% of KUBE FM whose management and members are incomplete, 46.15% of KUBE FM do not have letterhead, 11.54% of KUBE FM do not have financial books, 3.85 % do not have recording and reporting, 25% do not have written and unwritten rules. The research conclusion shows the need for reorganization efforts, improving administration and group norms in at least 29% of KUBE FM.

Keywords:

Institutional, KUBE FM

Author correspondence email: episupiadi4@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>

Copyright (c) 2024 by Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial



Abstrak

Penelitian ini memeriksa aspek kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang melayani masyarakat miskin di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode statistik deskriptif serta pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah mengevaluasi struktur kelembagaan KUBE dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh KUBE FM. Dengan teknik purposive sampling, penelitian ini melibatkan 52 anggota KUBE sebagai responden utama dan 33 informan dari berbagai peran dalam KUBE FM sebagai sampel pendukung. Temuan menunjukkan kekuatan kelembagaan KUBE bervariasi dari sedang hingga tinggi, dengan tantangan utama meliputi manajemen dan keanggotaan yang tidak lengkap (25%), kekurangan dokumen resmi (46,15%), serta masalah administrasi dan regulasi (25%). Analisis ini menyoroti kebutuhan akan reorganisasi, peningkatan administrasi, dan penguatan norma kelompok dalam KUBE FM. Temuan ini penting untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan keberlanjutan serta efektivitas KUBE FM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Implikasi penelitian memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan dan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi KUBE FM.

Kata Kunci:

Aspek Kelembagaan, Pemberdayaan Ekonomi, Kabupaten Sumedang

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan terus-menerus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Maret 2022, namun menurun sebesar 0,14 persen poin dibandingkan dengan September 2021 (Fitria & Fachrurozi, 2023). Kondisi ini menuntut perhatian dan aksi tidak hanya dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat yang harus berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menangani permasalahan kemiskinan ini. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah

pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di berbagai daerah (Firdaus et al., 2023). Program KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pembentukan kelompok usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (*Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, 2018).

Menurut Direktorat Jenderal Fakir Miskin Kementerian Sosial RI (2019), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Menurut (Fitria & Fachrurozi, 2023), Pembentukan KUBE merupakan Langkah yang sangat penting dalam proses pelibatan masyarakat. Merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Fitria & Fachrurozi, 2023; Patilima et al., 2019b; Sari, 2017; Zulkarnain et al., 2020). Program KUBE ini terbentuk dalam dua versi, yakni kelompok yang terbentuk oleh keinginan anggota atau masyarakat yang bersangkutan, adapula yang terbentuk secara dadakan karena akan menerima bantuan dana KUBE. KUBE sebagai kelompok usaha bersama berfungsi untuk mempercepat penghapusan kemiskinan (Fitria & Fachrurozi, 2023; Imandasari et al., 2022). Melalui KUBE, masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka panjang (Firman et al., 2020). Melalui KUBE juga masyarakat miskin yang sangat lemah dan rentan dapat saling bahu membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya (Mustafa, 2016)

Lebih lanjut, pembentukan KUBE bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan keterampilan usaha para anggotanya dan memberikan mereka akses terhadap permodalan dan pelatihan. Program ini juga dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Program KUBE dilaksanakan melalui pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, dan pendampingan. Menurut (*Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*, 2019) KUBE terdiri dari 5 sampai 10 kepala keluarga dari komunitas miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM).

Pendekatan kelompok dalam pengentasan kemiskinan dipilih oleh pemerintah karena beberapa alasan utama. Pertama, pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan individual, terutama bagi fakir miskin, karena kerja kelompok dapat meningkatkan rasa percaya diri, memberikan kekuatan yang lebih besar, serta menyatukan beragam sudut pandang dan

pengalaman dari setiap anggota. Kedua, penelitian oleh (Larantika et al., 2017) menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Ketiga, dalam pendekatan kelompok terdapat konsep tanggung jawab bersama dalam menghadapi kesulitan atau kerugian, yang dikenal dengan istilah "tanggung renteng".

Selain itu, pembentukan usaha bersama memiliki kelebihan seperti peningkatan modal, kontribusi aktif anggota, dan promosi usaha yang lebih cepat berkat jaringan keluarga dan teman yang luas. Dengan modal yang lebih besar, kelompok usaha dapat melakukan investasi signifikan dan mengakses sumber daya yang lebih luas, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Anggota kelompok juga dapat berbagi ide, keterampilan, dan pengalaman, yang meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam menjalankan usaha (Susilowati et al., 2021).

Kabupaten Sumedang di Jawa Barat memiliki 52 KUBE yang tersebar di lima kecamatan: Jati Gede (11 desa), Jatinunggal (9 desa), Wado (10 desa), Darmaraja (12 desa), dan Cisitu (10 desa). Dari 52 KUBE, 33 bergerak di bidang peternakan domba, 7 kambing, 8 pertanian, 3 perikanan, dan 1 ayam. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 1.040.000.000,- untuk KUBE, dengan anggota tiap kelompok sebanyak 10 orang dan bantuan sebesar 20 juta rupiah per kelompok (Lampiran SK Bupati Sumedang Tahun 2020). Sejak dibentuk, perkembangan KUBE di Kabupaten Sumedang, terutama selama pandemi Covid-19, belum diketahui. Pada masa ini, banyak usaha terpuruk akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Penelitian mengenai KUBE penting untuk mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan program pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE. Penelitian di Kabupaten Sumedang perlu fokus pada tujuan KUBE, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta kelembagaan sosial ekonomi. KUBE bertujuan membantu masyarakat berorganisasi dengan baik, meningkatkan rasa kekeluargaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama (Fitria & Fachrurozi, 2023; Salsabila et al., 2021), yang mendukung keberfungsian sosial anggota KUBE.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif, di mana setiap pendekatan memiliki peran penting dalam proses pengumpulan dan analisis data secara komprehensif. (Arikunto, 2013)

menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang sangat mengandalkan data angka, mulai dari tahap pengumpulan data, interpretasi, hingga presentasi hasilnya. Sebaliknya, (Suyitno, 2018) menggambarkan metodologi kualitatif sebagai suatu studi yang terfokus pada penjelasan dan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang istimewa, aktivitas sosial, kontradiksi, gagasan individu, atau interaksi antar manusia. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari partisipan yang diamati. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan data numerik dengan deskripsi, penjelasan, dan validasi atas fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Kelembagaan merupakan proses analisis atau penafsiran terhadap skor yang diperoleh dari jawaban responden terkait aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini mencakup indikator struktur KUBE, tujuan, kepengurusan, keanggotaan, tata usaha, dan norma kelompok.
2. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin (FM) adalah kelompok masyarakat miskin atau keluarga binaan sosial yang dibentuk di lokasi penelitian melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS). Kelompok ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi di bidang peternakan, pertanian, perikanan, dan perdagangan dengan semangat kebersamaan sebagai sarana peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
3. Kabupaten Sumedang merupakan lokasi penelitian yang terbatas pada lima kecamatan di mana terdapat KUBE FM. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Jatigede, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Wado, Kecamatan Darmaraja, dan Kecamatan Cisitu.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa metode, antara lain: angket, wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui tahapan penghitungan, pengeditan, dan tabulasi. Hasil data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang kemudian diberikan interpretasi atau penjelasan kualitatif. Tabel distribusi frekuensi dilengkapi dengan perhitungan skor untuk setiap item pertanyaan. Selanjutnya, dengan menggabungkan setiap item pertanyaan untuk setiap aspek penelitian, dibuatlah rekapitulasi jawaban

responden yang dilengkapi dengan perhitungan skor aktual dan skor ideal, serta dilakukan penghitungan indeks. Dilakukan juga perhitungan dengan menghitung nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian menghitung kelas interval dan merumuskan kategori. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan skor aktual dengan skor ideal sehingga aspek yang diteliti dapat dilihat apakah termasuk dalam kategori rendah, mendekati rendah, mendekati tinggi, atau tinggi. Data kualitatif disusun dalam bentuk paparan dan kutipan pernyataan langsung dari informan mengenai variabel yang diteliti. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan "pisau analisis" berupa konsep-konsep yang dijadikan landasan konseptual penelitian.

Hasil dan Diskusi

Hasil

Penelitian ini dilakukan di lima dari total 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, yaitu Kecamatan Darmaraja, Jatigede, Wado, Jatinunggal, dan Cisitu. Wilayah-wilayah ini terpengaruh oleh pembangunan Bendungan Jatigede, yang menyebabkan relokasi sejumlah besar penduduk, dan menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menangani permasalahan ekonomi di daerah tersebut.

Berdasarkan data yang tercantum dalam Buku Kabupaten Sumedang Dalam Angka Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Sumedang meningkat dari 1.154.000 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.159.000 jiwa pada tahun 2021, dan kemudian menjadi 1.167.000 jiwa pada tahun 2022. Rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2021 adalah 1,02 laki-laki per perempuan. Sebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah lokasi penelitian adalah Jatinunggal (3,89%), diikuti oleh Wado (3,78%), Darmaraja (3,11%), Cisitu (2,58%), dan Jatigede (1,90%).

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15–59 tahun, berjumlah 740.985 jiwa. Sementara sisanya adalah penduduk tidak produktif, sebanyak 426.048 jiwa, terdiri dari penduduk usia 0–14 tahun, yaitu sebanyak 252.663 jiwa, dan penduduk lanjut usia, yaitu usia 59 tahun ke atas, berjumlah 173.385 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumedang masih memiliki bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan penduduk tidak produktif

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya di Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 – 2022 mencapai 1,26%. Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan lokasi penelitian, yaitu Cisitu, mencapai 2,44% dan di

Jatinunggal 1,60%, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di 2 lokasi Kecamatan tersebut berada di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sumedang ke depan, khususnya dalam bidang pelayanan kependudukan dan pelayanan sosial.

Angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Sumedang menunjukkan pola yang menarik berdasarkan rentang usia. Pada rentang usia 7-12 tahun, tingkat partisipasi sekolah mencapai 99,43%, menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Sementara itu, untuk kelompok usia 13-15 tahun, partisipasi sekolah mencapai 96,76%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada persentase partisipasi sekolah pada rentang usia berikutnya. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 68,61%, mencerminkan adanya penurunan partisipasi di tingkat usia yang lebih dewasa.

Disisi lain, masyarakat Kabupaten Sumedang sebenarnya memiliki karakteristik sebagai pekerja keras dan memiliki semangat gotong royong. Namun, seiring berjalannya waktu, karakter tersebut mulai terkikis. Perkembangan zaman di era globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap karakter warga Sumedang, terutama pada generasi milenial yang kelak akan menjadi penerus Kabupaten Sumedang. Selain itu, terdapat juga ciri khas orang Sumedang yang senang berkelana sejak usia muda, baik itu untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau mencari pekerjaan. Meskipun ada pandangan bahwa berkelana keluar Sumedang dianggap tidak menyayangi daerah asal, namun ada juga pandangan yang menyatakan bahwa orang yang menempuh pendidikan atau bekerja di luar Sumedang adalah mereka yang akan menjadi pionir dalam memajukan daerah tersebut, dan nantinya akan tetap kembali ke Sumedang.

Sumedang sebagai pusat budaya Sunda, memiliki banyak kesenian yang mana kesenian itu sendiri adalah kreativitas manusia dalam pencarian identitas. Seni itu sendiri merupakan bentuk keahlian atau keterampilan manusia untuk mengekspresikan dan menciptakan hal-hal yang indah serta bernilai bagi kehidupan baik bagi diri sendiri maupun untuk masyarakat umum. Adapun Karya Budaya Tradisional Kabupaten Sumedang diantaranya: Seni Bangreng, Seni Gembyung, Kuda Renggong, Ketuk Tilu Cikeruhan atau Tari Cikeruhan, Tari Gotong Domba, Reak Kreasi, Tarawangsa, Rengkong, Tayuban, Angklung Jenglung, Songah, Umbul, Celempung, Calung, Goong Renteng, Seni Kromong Eyang Jangel, Reog, Samroh, Tanji, Adu Domba atau Katangkasna Domba. Pencatatan menunjukkan bahwa seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki kesenian tradisional, baik yang umum maupun yang khas. Beberapa kesenian yang umum, seperti marawis, tarawangsa, dan silat, dapat

ditemukan di setiap kecamatan, sementara yang khas, seperti seni Gotong Domba, hanya ada di wilayah Kecamatan Jatinangor.

Dilihat dari aspek kelembagaan pendidikan, data menunjukkan bahwa dari lima kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, Kecamatan Cisitu belum dilengkapi fasilitas SMA dan SMK. Hal ini Hal ini menandakan kebutuhan akan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Di samping itu, terdapat sebelas perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang yang tidak tersedia di lima kecamatan tempat penelitian dilakukan.

Dibidang kesehatan, Kabupaten Sumedang memiliki sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk tiga rumah sakit umum, 35 Puskesmas, dan 1.646 unit posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang. Data dari Dinas Kesehatan tahun 2021 juga mencatat jumlah tenaga kesehatan, yang terdiri dari 83 dokter, 15 dokter gigi, 447 perawat, 713 bidan, 61 tenaga farmasi, dan 37 tenaga gizi

Dibidang keagamaan, Kabupaten Sumedang dilaporkan memiliki 2.195 masjid, 1.436 musala, 16 gereja Protestan, 3 gereja Katolik, dan 1 kelenteng. Di lima kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, terdapat 50 masjid dan 72 musala di Kecamatan Cisitu, 27 masjid dan 28 musala di Kecamatan Darmaraja, 71 masjid, 21 musala, dan 1 gereja Protestan di Kecamatan Wado, 97 masjid dan 25 musala di Kecamatan Jatinunggal, serta 13 masjid dan 10 musala di Kecamatan Jatigede.

Selanjutnya, terkait dengan kondisi ekonomi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang meningkat dari 118.380 orang (10,26%) pada tahun 2020 menjadi 126.280 orang (10,71%) pada tahun 2021. Peningkatan ini diakibatkan oleh pembangunan Bendungan Jatigede yang memaksa banyak warga untuk direlokasi, serta dampak pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui Dinas Sosial, telah merancang berbagai strategi. Strategi pertama adalah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sembako dari Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat bantuan sosial daerah dan bantuan sosial selama pandemi Covid-19, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa dan Kementerian Sosial. Selain itu, strategi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tersebar di lima kecamatan dan 52 desa.

Responden dalam penelitian ini adalah Ketua KUBE FM di lima kecamatan tempat penelitian dilakukan, yang berjumlah 52 orang. Karakteristik responden menunjukkan bahwa 51 orang (98,08%) merupakan laki-laki dan

hanya 1 orang (1,92%) perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemimpinan dalam berbagai jenis pekerjaan di KUBE, seperti peternakan, pertanian, dan perikanan, masih didominasi oleh laki-laki. Seluruh responden beragama Islam, sesuai dengan mayoritas pemeluk agama Islam di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan responden. Sebanyak 51,92% dari total responden memiliki pendidikan setara SMA, sedangkan hanya 1,92% yang telah mencapai pendidikan Diploma 2 sebagai pendidikan tertinggi. Data ini menunjukkan bahwa orientasi untuk mencapai pendidikan tinggi belum menjadi prioritas utama bagi responden. Sebagai contoh, seorang informan dengan inisial "A" menyatakan bahwa anaknya telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA, dan menilai bahwa pendidikan SMA sudah cukup untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 1.

Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	f	%
SD/Sederajat	11	21,15
SLTP/Sederajat	13	25,00
SLTA/Sederajat	27	51,92
D-I	0	0,00
D-II	1	1,92
Total	52	100,00

Tabel 2 menunjukkan variasi mata pencaharian responden di luar kegiatan pengelolaan KUBE. Mata pencaharian yang paling dominan adalah sebagai buruh harian lepas sebesar 42,31%, diikuti oleh profesi sebagai wiraswasta sebesar 36,54%. Data ini mengindikasikan bahwa pengelolaan KUBE umumnya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan.

Tabel 2.

Jumlah Responden Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2023

Mata Pencaharian	f	%
Buruh Harian Lepas	22	42,31
Wiraswasta	19	36,54
Buruh Tani	8	15,38
Ibu Rumah Tangga	1	1,92

Lainnya	2	3,85
Total	52	100,00

Tabel 3 menampilkan distribusi KUBE di sekitar Waduk Jatigede, dengan jumlah terbesar terdapat di Kecamatan Darmaraja dan Jatigede, masing-masing sebesar 23,08%. Hal ini menandakan bahwa pembentukan KUBE awalnya diperuntukkan bagi orang-orang terdampak (OTD) oleh proyek Jatigede dan pandemi Covid-19. Penjelasan ini disampaikan oleh informan berinisial “S” dan “K”, yang mengungkapkan bahwa program ini diinisiasi sebagai upaya dari Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pembangunan proyek Jatigede di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, seluruh anggota KUBE diikutsertakan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 3.

Jumlah Responden Berdasarkan Tempat Tinggal Tahun 2023

Tempat Tinggal	f	%
Cisitu	1	19,23
0		
Darmaraja	1	23,08
2		
Jatigede	1	23,08
2		
Jatinunggal	9	17,31
Wado	9	17,31
Total	5	100,00
2		

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 12 anggota KUBE FM dan 10 fasilitator KUBE FM tingkat desa (karena tidak ditemukan 2 fasilitator lainnya). Hasil penelitian Aspek Kelembagaan KUBE FM dapat diuraikan sebagai berikut:

Latar belakang munculnya KUBE FM di Kabupaten Sumedang diawali dengan adanya pembangunan Bendungan Jatigede yang membawa perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat Sumedang, sehingga banyak orang terkena dampak (OTD), terutama di wilayah sekitar bendungan Jatigede. Selain itu, penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sumedang memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab dan wewenang pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat atau orang yang terkena dampak (OTD) di wilayah tersebut, yang selaras dengan kebijakan pembangunan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Hampir semua instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membentuk salah satu program yang dapat membantu masyarakat dalam situasi pasca pandemi tersebut.

Parafrase dengan Perubahan Kata dan Urutan

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, sebagai lembaga yang menangani isu-isu sosial, memprakarsai Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdaftar (Non DTKS). Namun, dengan berjalannya waktu, dikeluarkan peraturan gubernur yang merujuk pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) yang menetapkan bahwa penerima bantuan harus berasal dari DTKS. Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki tim penanggulangan kemiskinan daerah, yang salah satu fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi melalui KUBE. Dari tim ini, dikembangkan Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Sigesit) yang mencakup KUBE digital. Sistem ini dikelola dan dimonitor secara bersama oleh pemerintah daerah, Kominfo, dan Dinas Sosial melalui pendampingan dan pengawasan.

Tujuan program KUBE FM adalah (1) pemberian jaminan perlindungan sosial untuk melindungi beban pengeluarannya dan (2) peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang tergabung dalam KUBE FM. Secara lebih rinci Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 102 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Pembentukan KUBE dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kapasitas individu, dan meningkatkan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Hasil FGD menunjukkan bahwa pembentukan KUBE FM difasilitasi oleh Bappeda, Dinas Sosial, dan Diskominfo Kabupaten Sumedang sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah selama pandemi. Selain itu, pendamping PKH turut mengawal program ini dari tahap awal pembentukan, pengajuan proposal, hingga pencairan dana dan pendampingan. Sejak tahun 2020, pendampingan ini juga dibantu oleh TSKS karena belum ada fasilitator resmi, yang kemudian diikuti oleh pembentukan fasilitator Puskesmas sebagai pendamping KUBE pada tahun 2021.

Penetapan anggota KUBE dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 102 Tahun 2020, Pasal 3 ayat 1. Pasal tersebut mengamanatkan tiga kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama.
2. Memiliki jenis usaha dan tinggal di wilayah desa dalam kecamatan yang sama.
3. Memiliki keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Selanjutnya, mengenai jenis usaha KUBE, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2023

Jenis Usaha KUBE	f	%
Perikanan	3 77	5,69
Ternak Domba	36 ,23	9,62
Ternak Kambing	5 62	1,92
Ternak Ayam	1 92	13,46
Pertanian	7 46	10
Total	52 0,00	

Berdasarkan Tabel 4, dari total responden KUBE, 69,23% memiliki jenis usaha ternak domba, diikuti oleh 13,46% pertanian dan 9,62% ternak kambing dan 5,77% perikanan juga 1,92 % ternak ayam. Data tersebut menunjukkan bahwa ternak domba merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian dan didukung oleh aparat pemerintahan desa (jurutulis) yang rela menghibahkan bangunannya untuk digunakan bagi KUBE Motekar Jaya.

Tabel 5.

Jumlah Responden Berdasarkan Sub Aspek Kelembagaan KUBE FM Tahun 2023

memiliki pencatatan dan pelaporan. Selain itu, 25% KUBE FM tidak memiliki aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

KUBE FM yang tidak memiliki kop surat mengindikasikan tidak adanya hubungan surat menyurat, meskipun pada awalnya, saat pengajuan proposal, nama KUBE dibuat dalam bentuk kop surat. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa pembentukan KUBE FM sebenarnya ditentukan oleh pihak lain. Ketidakmampuan KUBE FM dalam menyusun catatan keuangan menunjukkan kurangnya ketertiban dalam pertanggungjawaban keuangan dan tidak adanya proses keluar masuk keuangan di dalam KUBE tersebut. KUBE FM yang tidak menyediakan laporan disebabkan oleh tidak lagi terinstalnya aplikasi pelaporan, dan hanya memberikan pelaporan melalui grup WhatsApp. KUBE FM yang tidak memiliki aturan berisiko mengakibatkan pembubaran anggota. Berdasarkan perhitungan, total skor aktual adalah 1,010, yang menunjukkan bahwa aspek kelembagaan KUBE termasuk dalam kategori sedang hingga tinggi.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98,1 % responden berjenis kelamin laki-laki, yang berarti kepemimpinan KUBE FM lebih dipercayakan kepada laki-laki. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa laki-laki menjadi perwakilan yang mengambil keputusan untuk KUBE FM.

Berbagai penelitian menyoroti peran penting perempuan dalam kepemimpinan kelompok usaha bersama dan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam Kelompok Wanita Tani (KWT), perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat (Bonewati et al., 2022; Paliyama et al., 2021; Patilima et al., 2019a). Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan buruh tani memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga di berbagai daerah (Nurmagfirah et al., 2021). Selanjutnya, pemberdayaan kelompok perempuan berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terbukti meningkatkan pendapatan tambahan bagi kelompok perempuan, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga (Winarti et al., 2020).

Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya mampu memimpin kelompok usaha kolektif, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, keberadaan perempuan dalam kelompok usaha bersama juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga (Bonewati et al., 2022; Safrida & Safrida, 2022; Satiti et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi

pemimpin kelompok usaha bersama dan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan laki-laki lebih banyak terlibat dalam kelompok usaha bersama, yang mencakup beberapa hal. Salah satunya adalah tingkat partisipasi laki-laki dalam kegiatan ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti umur, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan lama perkawinan (Susilowati et al., 2024; Susilowati & Yuliani, 2020; Taufiqurrahman et al., 2018). Faktor sosial budaya, kepercayaan, kebutuhan ekonomi, dan persepsi masyarakat terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga dan usahatani juga dapat memengaruhi tingkat kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi (Nurmayasari et al., 2020).

Selain itu, faktor-faktor lain seperti pengaruh budaya patriarki, proses seleksi dalam partai politik yang masih bias gender, dan kurangnya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan juga dapat memengaruhi keputusan laki-laki lebih banyak terlibat dalam kelompok usaha bersama (Kasim et al., 2022). Peran gender, norma subyektif, lingkungan sosial, dan faktor internal seperti niat dan lingkungan sosial juga dapat memengaruhi perilaku laki-laki dalam kegiatan ekonomi (Putri, 2021). Penting untuk mencatat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing kelompok usaha bersama. Upaya untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi dalam kelompok usaha bersama perlu melibatkan pendekatan yang inklusif dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi laki-laki dan perempuan secara holistik.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan responden yang sebagian besar (51,9%) berpendidikan SLTA/ sederajat, dan tidak ada satupun responden yang memiliki gelar sarjana, hal ini mengandung arti bahwa orientasi terhadap pendidikan tinggi belum menjadi pemikiran utama bagi responden. Selain itu, terdapat alasan ilmiah mengapa orang merasa cukup berpendidikan hanya dengan lulusan SLTA. Salah satunya adalah persepsi individu terhadap tingkat pendidikan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Beberapa orang mungkin merasa bahwa dengan memiliki latar belakang pendidikan SLTA, mereka sudah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mencapai tujuan mereka tanpa perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Taufiqurrahman et al., 2018).

Di samping itu, faktor ekonomi juga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk berhenti berpendidikan setelah SLTA. Keterbatasan finansial atau kesempatan kerja yang tersedia mungkin membuat seseorang merasa cukup

berpendidikan dengan SLTA saja untuk memasuki dunia kerja atau memulai usaha sendiri (Fauziyah, 2018). Faktor sosial dan budaya juga dapat memainkan peran dalam persepsi seseorang terhadap pendidikan. Norma-norma sosial di masyarakat atau ekspektasi dari lingkungan sekitar juga dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Dewi, D., Wulandari, L., & Karmaya, 2013). Ini menunjukkan kompleksitas dalam evaluasi tingkat pendidikan dalam konteks masyarakat. Memahami faktor-faktor yang memengaruhi pilihan pendidikan individu penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Terdapat satu sumber yang menyebutkan bahwa terdapat persyaratan pendidikan minimal SMA untuk bergabung dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bidang penanganan fakir miskin di Kabupaten Garut (Indra et al., 2022). Namun, tidak ada informasi yang menyebutkan apakah persyaratan pendidikan minimal SMA juga berlaku untuk KUBE di daerah lain atau untuk KUBE yang tidak terkait dengan penanganan fakir miskin. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebijakan resmi dari pemerintah atau organisasi terkait pendidikan minimal untuk bergabung dengan KUBE secara umum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat mata pencaharian lain disamping mengelola KUBE FM. Di antaranya, yang paling banyak adalah sebagai buruh harian lepas sebesar 42,3%, diikuti oleh wiraswasta sejumlah 36,5%. Ini berarti bahwa mengelola KUBE FM hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Namun, perlu dicatat bahwa KUBE FM tidak hanya dilihat sebagai pekerjaan sampingan, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, perlu diberikan pelatihan dan motivasi kepada anggota KUBE agar mereka mau serius dalam mengikuti KUBE dan bukan hanya sebagai pekerjaan sampingan (Nolisa & Edalmen, 2021). KUBE merupakan sarana bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktifnya dan memotivasi mereka untuk menjadi anggota kelompok. Hal ini relevan dengan pendapat (Effendy & Apriani, 2018) yang membahas motivasi anggota kelompok tani dalam meningkatkan fungsi kelompok.

Penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh komunitas KUBE FM berlokasi di sekitar Bendungan Jatigede, karena program ini ditujukan bagi orang-orang yang terdampak (OTD) oleh Bendungan Jatigede dan pandemi Covid-19. Seluruh anggota KUBE FM terdaftar dalam DTKS, yang menegaskan bahwa program ini dirancang untuk mendukung kelompok sasarannya. KUBE merupakan mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan sarana bagi masyarakat miskin untuk

meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dan mendorong partisipasi dalam kelompok. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan khusus penerima manfaat dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan dan kesesuaian dengan penerima manfaat.

Hasil studi ini menemukan bahwa 8 KUBE FM kehilangan peran sekretaris dan bendahara, yang merupakan kelembagaan penting dalam organisasi. Sekretaris berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi anggota sebelum berinteraksi dengan ketua atau pemimpin. Tugasnya mencakup pengaturan jadwal rapat, pemantauan aktivitas anggota, dan memberikan dukungan kepada ketua (Dewi & Octavia, 2018). Sekretaris juga bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen, penerimaan tamu, serta menjelaskan aktivitas organisasi kepada pihak luar. Di sisi lain, bendahara bertugas mengatur keuangan dan aset organisasi, serta bersama ketua membuat dan mengesahkan keputusan keuangan (Dewi & Octavia, 2018). Bendahara juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan dan memastikan transparansi terkait dengan pengeluaran dan pemasukan dana kepada anggota.

Peran dan fungsi bendahara dalam suatu kelompok atau organisasi mencakup berbagai aspek. Menurut (Malahayati & Syamsuar, 2022), bendahara memegang peranan penting dalam menjamin pengelolaan keuangan organisasi dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menguraikan pedoman formal, jelas, dan lengkap mengenai tugas dan peran setiap individu atau kelompok dalam organisasi. Hal ini menekankan tanggung jawab bendahara dalam memelihara catatan keuangan, mengelola dana, dan mematuhi peraturan keuangan dalam organisasi.

Selanjutnya, (Wahyuni et al., 2017) menyoroti pentingnya dinamika kelompok dan jaringan komunikasi dalam meningkatkan kapasitas individu dalam suatu kelompok. Bendahara, sebagai bagian dari kelompok, perlu mengkomunikasikan informasi keuangan secara efektif, berkolaborasi dengan anggota lain, dan memenuhi tanggung jawab keuangan mereka untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Fungsi tugas yang jelas, seperti mengelola anggaran, pelaporan keuangan, dan memastikan transparansi keuangan, sangat penting bagi bendahara untuk memenuhi perannya secara efektif dalam kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, tugas dan fungsi bendahara dalam suatu kelompok atau organisasi meliputi pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan keuangan, komunikasi

informasi keuangan, kerjasama dalam kelompok, dan menjamin transparansi keuangan untuk mendukung keberhasilan organisasi.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara sekretaris dan bendahara sangat penting dalam menjaga kelancaran aktivitas organisasi. Baik sekretaris maupun bendahara memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Berdasarkan sumber-sumber sitiran di atas, dapat dipastikan bahwa ketika KUBE FM tidak lagi memiliki sekretaris dan bendahara, maka aktivitas organisasi menjadi terganggu, bahkan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Temuan lainnya dalam aspek kelembagaan adalah terdapat 1 KUBE FM yang tidak memiliki ketua. Jika kelompok tidak lagi memiliki ketua, maka tugas dan tanggung jawab ketua harus dibagi-bagikan kepada anggota kelompok yang lain. Dalam situasi seperti ini, penting untuk melakukan musyawarah antar anggota kelompok untuk menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota agar kelompok tetap dapat berjalan dengan baik dan efektif (Kusnani et al., 2015).

Selanjutnya, ditemukan juga 4 KUBE FM yang tidak memiliki anggota. Jika kelompok tidak lagi memiliki anggota, maka kelompok tersebut tidak dapat berfungsi karena kelompok membutuhkan anggota untuk dapat beraktivitas dan berinteraksi (Prayitno, 2017). Dalam situasi seperti ini, kelompok dapat mencari anggota baru dengan melakukan promosi atau mengadakan kegiatan yang menarik minat orang untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Selain itu, kelompok juga dapat melakukan evaluasi terhadap diri sendiri untuk mengetahui penyebab tidak adanya anggota dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jika kelompok tidak dapat menemukan anggota baru atau mengatasi masalah yang ada, maka kelompok tersebut dapat bubar atau bergabung dengan kelompok lain yang memiliki kesamaan tujuan atau minat (Purnomo, 2020).

Berdasarkan jenis usaha KUBE, mayoritas (69,2%) KUBE FM diketahui memiliki usaha ternak domba. Data ini mengindikasikan adanya potensi lokal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Selain dari kebiasaan masyarakat dan dukungan pemerintah desa, ternak domba memiliki sejumlah keuntungan yang patut dipertimbangkan. Berdasarkan beberapa sumber (Asshofie, 2017; Grobogan, 2023; Krisnadewi, 2022; Rukmana & Yudirachman, 2015).

Berikut adalah beberapa keuntungan dari usaha ternak domba dalam aspek ekonomi:

1. Modal relatif kecil diperlukan untuk memulai usaha ternak domba.
2. Domba memiliki potensi pasar yang luas, terutama untuk produk dagingnya.

3. Domba mudah dipelihara dan memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan.
4. Domba memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan dapat ditenakkan di berbagai lingkungan.
5. Selain dagingnya, domba juga menghasilkan produk sampingan seperti kotoran dan bulu yang dapat dimanfaatkan.
6. Beternak domba merupakan sumber protein hewani yang penting untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia.

Kesimpulan

Karakteristik responden menyoroti pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan KUBE FM, reorientasi pendidikan bagi anggota KUBE FM, serta kebijakan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, mereka menekankan perlunya resosialisasi KUBE sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengelolaan KUBE FM, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anggota, dan mengimplementasikan kebijakan yang memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

Di samping itu, sebanyak 69,2% KUBE FM telah mulai usaha beternak domba, menunjukkan potensi lokal yang menjanjikan dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Beternak domba memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik. Kegiatan ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat dan dukungan pemerintah desa, yang memberikan banyak keuntungan ekonomi yang signifikan.

Meskipun aspek kelembagaan KUBE FM berada dalam kategori sedang hingga tinggi, namun diperlukan upaya reorganisasi, peningkatan administrasi, dan pembentukan norma kelompok, terutama untuk 29% KUBE FM yang masih memerlukan peningkatan dalam hal ini. Oleh karena itu, penyusunan ulang struktur organisasi, peningkatan administrasi, dan pembentukan norma kelompok yang jelas akan membantu meningkatkan efektivitas dan kinerja KUBE FM secara keseluruhan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan KUBE FM. Selain itu, diperlukan penelitian yang lebih terperinci mengenai strategi pengelolaan usaha beternak domba yang efektif, termasuk aspek pembiayaan, manajemen risiko, dan pemasaran. Analisis yang

lebih mendalam terhadap aspek kelembagaan KUBE FM yang masih perlu diperbaiki, dengan fokus pada reorganisasi, peningkatan administrasi, dan pembentukan norma kelompok yang lebih kuat, juga sangat diperlukan.

Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi dampak dari reorientasi pendidikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota KUBE FM. Terakhir, penelitian komparatif antara KUBE FM di wilayah Kabupaten Sumedang dengan daerah lain perlu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai faktor yang memengaruhi kinerja dan keberhasilan KUBE FM.

Bibliography

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asshofie, A. (2017). *Keuntungan Beternak Domba*. <http://agil-asshofie.blogspot.com/2017/01/keuntungan-beternak-domba.html?m=1>
- Bonewati, Y., Sirajuddin, S., & Abdullah, A. (2022). Peran perempuan yang tergabung dalam kelompok wanita tani (kwt) pada usaha ternak sapi potong dengan sistem integrasi. *Jurnal Sains Dan Teknologi Peternakan*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/jstp.v4i1.1857>
- Dewi, D., & Octavia, L. (2018). Peran sekretaris dalam mengelola surat masuk dan surat keluar pada dinas perpustakaan dan arsip daerah kota tangerang selatan. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 4(1), 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/skr.v4i2.823>
- Dewi, D., Wulandari, L., & Karmaya, I. (). (2013). Kerentanan perempuan terhadap penularan ims dan hiv: gambaran perilaku seksual berisiko di kota denpasar. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 1(1), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.15562/phpma.v1i1.152>
- Effendy, L., & Apriani, Y. (2018). Motivasi Anggota Kelompok Tani dalam Peningkatan Fungsi Kelompok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(2), 10–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.35906/jep01.v4i2.270>
- Fauziyah, E. (2018). Access and control of farm households in the management of private forest resources. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.20886/jai.2018.1.1.33-45>
- Firdaus, M. A., Susilowati, E., Halimah, F. N., & Dani, R. (2023). JURNAL IJSW VOL 7 NO 1 2023: PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KERJA BUMDES SAUYUNAN, DI DESA *Indonesian Journal of Social Work*.

- Firman, F., Dirwan, D., & Mariah. (2020). Dampak Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(1), 1–9.
- Fitria, M., & Fachrurazi. (2023). Faktor Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business.*, 2(1), 34–40. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56916/jimab.v2i1.361>.
- Grobogan, D. (2023). *Sederet Keuntungan Beternak Domba*.
- Imandasari, R., Afifuddin, A., & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama di Kota Malang. *Respon Publik*, 16(4), 63–68.
- Indra, A. K., Tan, F., & Maryanti. (2022). Dampak partisipasi program kelompok usaha bersama (kube) terhadap kesejahteraan penerima program. *Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.9853>
- Kasim, S., Moita, S., Bahtiar, B., Wang, L., & Masrul, M. (2022). Potret keterwakilan politik perempuan diparlemen dan faktor-faktor penghambatnya. *Jurnal Neo Societal*, 7(2), 78. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/jns.v7i2.24539>
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. (2018). Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Buleleng. <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kelompok-usaha-bersama-kube-23#:~:text=KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama,usaha melalui program Bantuan Langsung>
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. (2019). Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/kube>
- Krisnadewi, V. (2022). *Cara Memperoleh Keuntungan dari Budidaya Kambing dan Domba*. Inspirasi Kagama. <https://kagama.id/inspirasi-kagama-16-cara-memperoleh-keuntungan-dari-budidaya-kambing-dan-domba/>
- Kusnani, D. K., Muljono, P., & Amiruddin, S. (2015). Dinamika Kelompok Penerima CSR PLN Tarahan Lampung Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v11i2.10578>
- Larantika, A. A. A. D., Zauhar, S., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Collaboration as a strategy for poverty alleviation. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 40–48. <https://doi.org/10.21744/ijssh.v1i3.51>
- Malahayati, M., & Syamsuar, D. (2022). Investigasi hambatan dan tantangan penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(5), 901–910. <https://doi.org/https://doi.org/10.25126/jtiik.2022944954>

- Mustafa, A. A. (2016). *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar*.
- Nolisa, E., & Edalmen, E. (2021). Pengaruh motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan pd. harum jaya. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(2), 345. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmk.v3i2.11878>
- Nurmagfirah, N., Idris, R., Suyitno, I., & Mana, R. (2021). Kontribusi perempuan buruh tani terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga di desa Bambapuang kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 240. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.21547>
- Nurmayasari, I., Mutolib, A., Hudoyo, A., Yanfika, N., Khoirunnisa, A., Mangesti, R., & Rahmadanti, R. (2020). Tingkat kesetaraan gender pada rumah tangga petani sawi di pekon campang kecamatan gisting kabupaten tanggamus. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32487/jshp.v4i1.783>
- Paliyama, J. K., Susilowati, E., & ... (2021). Resiliensi Perempuan Dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah* <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495615&val=23813&title=RESILIENSI%20PEREMPUAN%20DENGAN%20KEHAMILAN%20TIDAK%20DIINGINKAN%20DI%20KOTA%20BANDUNG>
- Patilima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019a). Modul Dasar Pelatihan Dasar Konvensi Hak Anak bagi Penyedia Layanan dan Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan *Pemberdayaan Perempuan Dan*
- Patilima, H., Susilowati, E., Santoso, A. B., & Ritonga, A. (2019b). *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak. ... Pemberdayaan Perempuan dan*
- Prayitno. (2017). *Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok yang Berhasil: Dasar dan Profil*. Ghalia Indonesia.
- Purnomo, U. (2020). *Karang Taruna, Struktur dan Apa Program Kerjanya*. <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/145/353>
- Putri, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian frozen food di ud mitra abadi kecamatan maduran kabupaten lamongan. *Agriscience*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/agriscience.v2i1.11346>
- Rukmana, R., & Yudirachman, H. (2015). *Potensi Ekonomi Ternak Domba*.

- Safrida, & Safrida, N. (2022). Strategi pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal di Gampong Pulau Kayu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 239–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/transformasi.v18i2.4948>
- Salsabila, J. A., Susilowati, E., & Hambali, E. (2021). Pengasuhan Alternatif Anak di Panti Sosial Asuhan Anak Muhammadiyah Sumur Bandung Kota Bandung. *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Individu Dan*
- Sari, P. (2017). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 99–107.
- Satiti, E., Andarwati, S., & Kusumastuti, T. (2022). Peran perempuan dalam peternakan sapi perah pada kelompok tani ternak desa samiran, boyolali, jawa tengah. *Jurnal Kawistara*, 12(1), 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.70721>
- Susilowati, E., Soelton, M., Yusuf, H., &.... (2024). Transgender people in Indonesia: how do they overcome their personal adjustment toward stress? *Journal of Ethnic &* <https://doi.org/10.1080/15313204.2024.2338384>
- Susilowati, E., Subardhini, M., & (2021). Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa Covid-19: Inovasi Praktik Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa *Peksos: Jurnal Ilmiah* <https://scholar.archive.org/work/rcjaitksomrfrlfrlkm3tl3warc3i/access/wayback/https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/download/361/296>
- Susilowati, E., & Yuliani, D. (2020). Implementasi Fungsi Supportif Supervisi Pekerja Sosial Penanganan Masalah Sosial Anak Di Indonesia. *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Individu Dan*
- Suyitno. (2018). *METODE PENELITIAN KUALITATIF KONSEP, PRINSIP DAN OPERASIONALNYA* (Ahmad Tanz). Akademia Pustaka.
- Taufiqurrahman, F., Sumarti, T., & Falatehan, S. (2018). Hubungan tingkat partisipasi laki-laki dengan tingkat keberdayaan ekonomi perempuan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.29-42>
- Wahyuni, S., Sumardjo, S., Lubis, D., & Sulisworo, D. (2017). Hubungan jaringan komunikasi dan dinamika kelompok dengan kapasitas petani dalam agribisnis padi organik di jawa barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 110. <https://doi.org/https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.15115>

- Winarti, S., Herawati, H., & Sidik, F. (2020). Pemberdayaan kelompok perempuan berbasis badan usaha milik desa di desa ponggok, kabupaten klaten. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 171–184.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1854>
- Zulkarnain, T. A., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2020). Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(1).